

## RINGKASAN

*Binti Nasikhatul Ummatin, 2023. Partai Politik dalam Perspektif Regulasi dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai Pkb, Pdi-P, dan Golkar Kota Probolinggo). Veronica Sri Astuti N., S.E, M.Si, Husni Mubaraq S.Fil.I., M.IP, 112hal + xviii*

Upaya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia harus dilihat dalam konteks transisi bangsa Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis. Inti dari demokrasi adalah mengejar kesetaraan politik bagi semua warga negara, termasuk kelompok yang terpinggirkan dan minoritas. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia secara demografis adalah perempuan, mereka hanyalah mayoritas yang diam - kelompok besar yang terpinggirkan secara politik, sosial budaya dan ekonomi - dan seringkali absen dari proses pengambilan keputusan.

Sistem pemilu merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Oleh karena itu, tindakan khusus sementara pada masa reformasi diatur dalam bentuk tindakan afirmatif, atau kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Upaya afirmasi yang tertuang dalam kebijakan legislatif terbukti efektif meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif, khususnya DPR.

Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (Cholisin, 2007), partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan individu atau kelompok yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Yakni, memilih pemimpin nasional dan mempengaruhi kebijakan secara langsung atau tidak langsung (Tatanan Umum). Kegiatan tersebut meliputi kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menghadiri partai politik atau kelompok kepentingan, dan berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau legislator.

Kajian ini berfokus pada implementasi kebijakan kuota 30% perempuan di partai politik, yang pada akhirnya akan memiliki keterkaitan dengan jumlah perempuan di parlemen.

**Kata kunci: partai politik, kesetaraan gender, partisipasi politik**



## SUMMARY

*Binti Nasikhatul Ummatin, 2023: Political Parties in the Regulatory Perspective and Implementation of Women's Representation (Studies on Pkb, Pdi-P, and Golkar parties in Probolinggo City). Veronica Sri Astuti N., S.E, M.Si, Husni Mubaraq S.Fil.I., M.IP, 112hal + xviii*

*Increasing women's political participation in Indonesia must be seen in the context of the transition of Indonesian society towards a more democratic political system. The essence of democracy is political equality for all citizens, marginalized groups and minorities. Even though the majority of Indonesia's population is demographically women, the silent menara - a large group that is marginalized politically, socially, culturally and economically - and sariyane are absent from the pemangani besedung process.*

*The electoral system is one of the silvering factors in observing the level of women's representation in parliament. Therefore, during the reform era, the special gift of semanta was regulated in the form of an affirmative agreement, or a quota of 30% for women's representation in the list of candidates. Affirmative efforts contained in legislative politics have proven to be effective in increasing the number of women working in the legislature, especially the DPR.*

*As stated by Miriam Budiarjo (Cholisin, 2007), political participation in general can be interpreted as the activities of individuals or groups who actively participate in political life. Namely having a national machine and influencing policy directly or indirectly (General Order). These activities include voting in*

*public ceremonies, general meeting participants, political party participants or kulump bebehegan, and interactions with Omanita Perumandi or legislators.*

*This study focuses on implementing the 30% quota policy for women in political parties, which will ultimately have an impact on reducing the number of women in parliament.*

*Keywords: political parties, gender equality, political participation*